

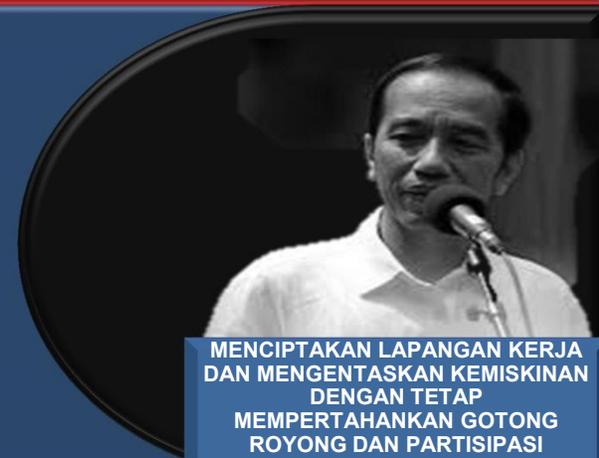


Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



PEDOMAN UMUM

PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018



MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA
DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN
DENGAN TETAP
MEMPERTAHANKAN GOTONG
ROYONG DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DESA

Diktum VII, Nomor 5, SKB Mendagri 140-8698/2017; Menkeu 954/KMK.07/2017;
Mendesa PDTT 116/2017; MenPPN 01/SKB/M.PPN/12/2017
(VII . 5 . SKB 4 M)





Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

KATA PENGANTAR

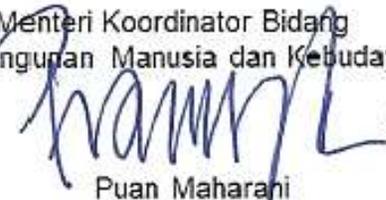


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pembangunan desa bertujuan antara lain untuk memajukan perekonomian masyarakat Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam melaksanakan amanat Undang-undang Desa tersebut, Pemerintah memperkuat upaya pembangunan desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dalam upaya mempercepat pemecahan masalah kemiskinan, kesenjangan dan masalah *stunting* di desa, mulai tahun 2018, Presiden menugaskan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan program Padat Karya Tunai Di Desa (*Cash for Work*) diseluruh desa. Khusus untuk penanganan masalah *stunting* akan diprioritaskan di 1.000 desa dalam 100 Kabupaten.

Guna mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa dan sekaligus pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu disusun Pedoman Umum sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan berbagai pihak lainnya. Pedoman umum ini akan disertai dengan pedoman pelaksanaan yang lebih rinci dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan dengan tetap memperhatikan kondisi ketenagakerjaan; keragaman kondisi sosial, budaya dan ekonomi; serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Puan Maharani



1

Pendahuluan

2

Arahan Pelaksanaan

3

Pelaksanaan
Kegiatan Padat Karya

4

Pengorganisasian

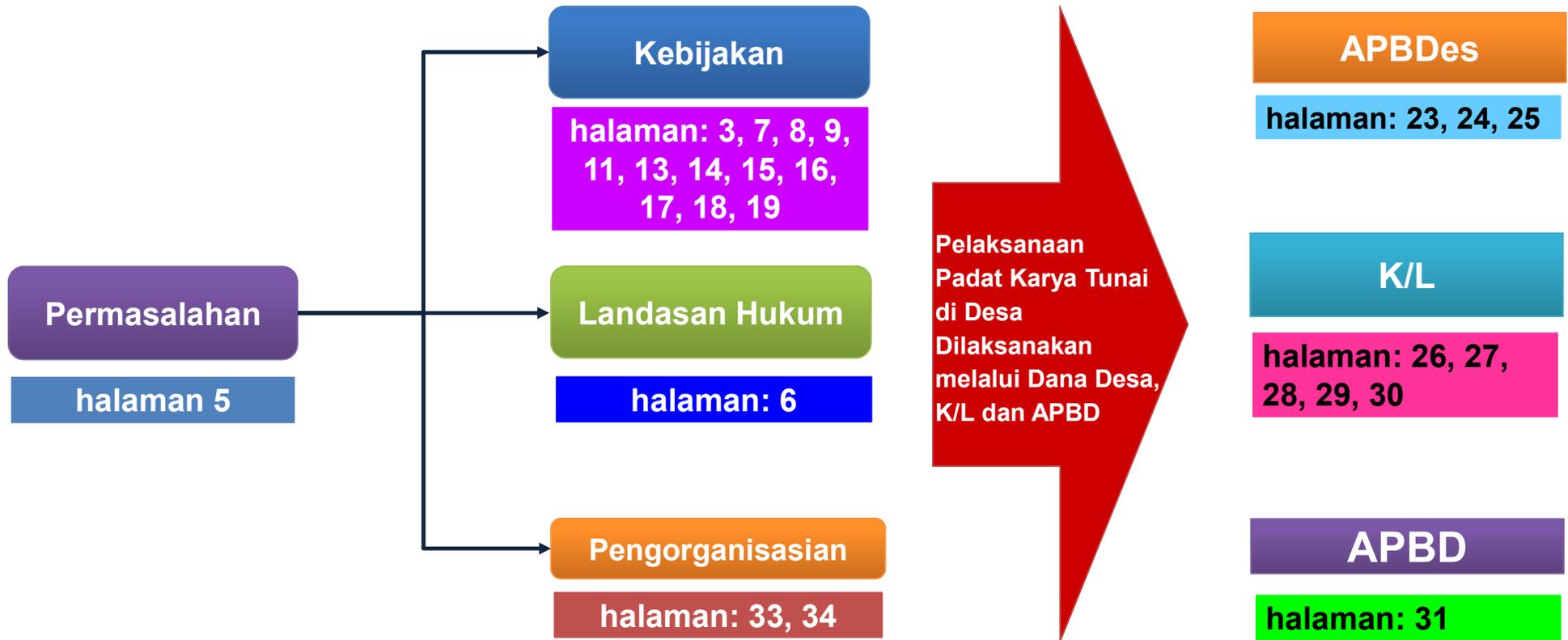
5

Penutup

Lampiran



SISTEMATIKA PENYAJIAN PEDOMAN UMUM





DAFTAR SINGKATAN



PKTD	:	Padat Karya Tunai di Desa	KUR	:	Kredit Usaha Rakyat	PAMSIMAS	:	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
PKH	:	Program Keluarga Harapan	KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama	Pendamping PLUT	:	Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu
Rastra	:	Beras Sejahtera	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Pendamping IUMK	:	Pendamping Izin Usaha Mikro Kecil
SDM	:	Sumber Daya Manusia	RKP Desa	:	Rencana Kerja Pemerintah Desa	TPK	:	Tim Pengelola Kegiatan
BPD	:	Badan Permusyawaratan Desa	RAPBDesa	:	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	RAB	:	Rencana Anggaran Blaya
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	APBDesa	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
Kemenko PMK	:	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah	Perpres	:	Peraturan Presiden
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah	HOK	:	Hari Orang Kerja	DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
SK	:	Surat Keputusan	Monev	:	Monitoring dan Evaluasi	Satgas Pengawas KSP	:	Satgas Pengawas Koperasi Simpan Pinjam
DD	:	Dana Desa	RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah	RKD	:	Rekening Kas Desa
K/L	:	Kementerian/Lembaga	TKPKD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah		:	



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



BAB 1

PENDAHULUAN





1.1. DEFINISI PADAT KARYA TUNAI



“Padat karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.”



1.2. LATAR BELAKANG

Rapat
Terbatas
Tanggal 18
Oktober 2017



Pemanfaatan Dana Desa dan berbagai program Kementerian/Lembaga yang ditujukan ke Desa harus dilakukan dengan model padat karya.

Rapat
Terbatas
Tanggal 3
November
2017



- Penciptaan kesempatan kerja di Desa dan peningkatan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa dilakukan dengan Padat Karya Tunai (*cash for work*), dan swakelola.
- Pelaksanaan program K/L di daerah khususnya desa perlu diarahkan untuk mendukung Padat Karya Tunai Di Desa.
- Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan potensi Desa.
- Penyederhanaan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa.

Rakor Tingkat
Menteri
Tanggal 8
Desember 2017



- Prioritas lokasi Padat Karya Tunai di Desa pada tahun 2018 adalah 1.000 desa di 100 kabupaten yang diusulkan oleh Bappenas bersama TNP2K.
- Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk menciptakan kesempatan kerja dan memberikan tambahan upah/pendapatan bagi masyarakat desa.
- Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
- Program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program Padat Karya Tunai di Desa.
- Program Padat Karya Tunai di Desa tidak hanya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, tetapi juga kegiatan pemberdayaan yang bersifat produktif dan berkelanjutan dengan pelibatan BUMDes, Koperasi dan UMKM.
- Optimalisasi peran Pendamping Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.
- Optimalisasi peran aparat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan padat karya tunai di Desa



1.3. RUANG LINGKUP

Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018



- Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan, prinsip dasar, dan jenis kegiatan padat karya.
- Pedoman umum ini juga memuat penjelasan tentang tata cara perencanaan, pelaksanaan teknis dan pengorganisasian Padat Karya Tunai di Desa.
- Pedoman ini menjelaskan peran Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam mendukung pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa secara berkelanjutan, dan pemeliharaan hasil kegiatan padat karya agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan pembangunan desa.



1.4. KERANGKA PIKIR



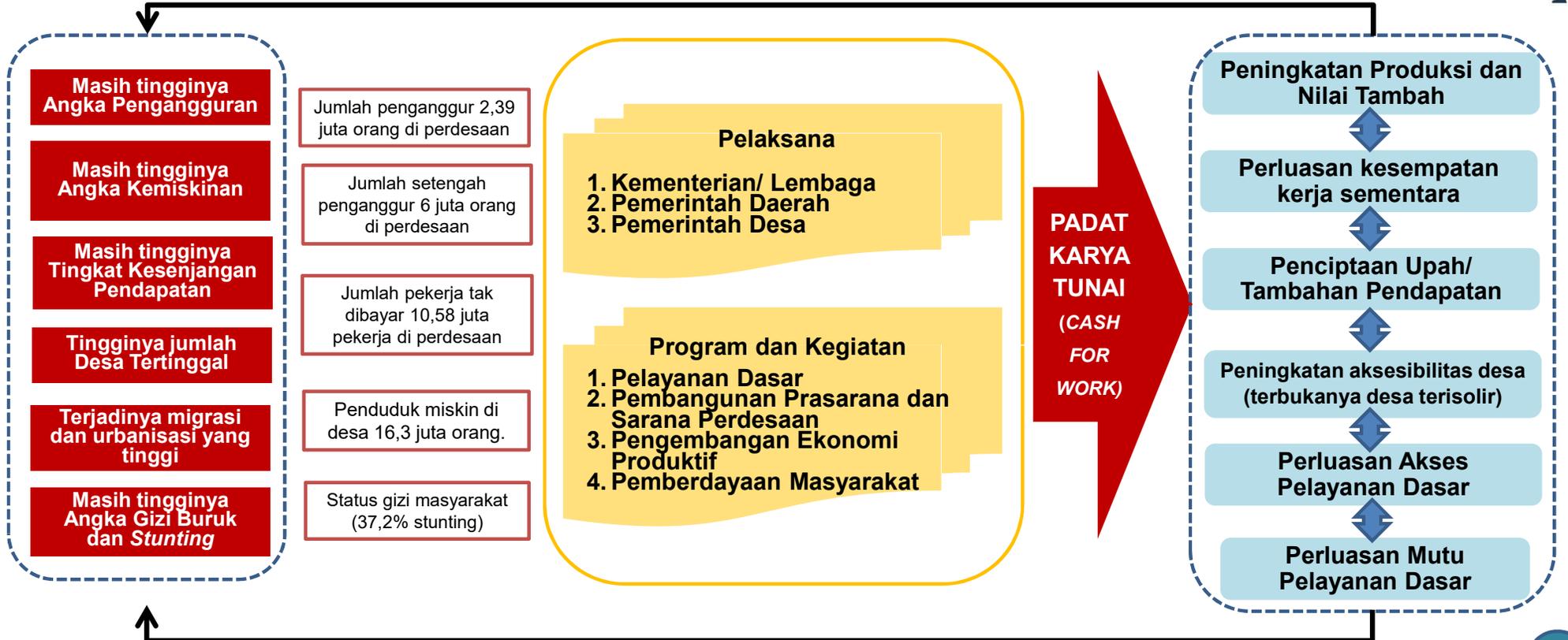
MASALAH



PROGRAM DAN KEGIATAN



MANFAAT DAN DAMPAK





1.5. DASAR HUKUM

UU DESA (Ps. 22)

Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

PP No.43/2014 (Ps. 127)

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan:

- mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
- mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;
- menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

Permendagri No.114/2014

Sehubungan dengan penyusunan dan perubahan RKP Desa guna memastikan perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran yang mendukung kebijakan padat karya tunai di Desa.

Perpres 54/2010 juncto Perpres 70/2012 junctis Perpres 172/2014 junctis Perpres 4/2015

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/Lembaga (termasuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola)

Perka LKPP No. 13/2013 juncto Perka LKPP No.22/2015

Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

PMK 50/PMK.07/2017 juncto PMK 112/PMK.07/2017

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari Desa setempat.

PMK 168/PMK.05/2015 juncto PMK 173/PMK.05/2016

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada K/L

Arahan Presiden

Penciptaan lapangan kerja di desa di optimalkan dengan padat karya, *cash for work*, dan swakelola

SKB 4 Menteri tentang tentang Penyalarsan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa

Keterangan: Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa pembiayaannya bersumber dari APBDesa dan Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

1.6.A. MAKSUD

1

Memberikan acuan atau pedoman kerja bagi para pengelola dan pelaksana padat karya tunai di Desa sehingga dapat memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya.



2

Menyamakan persepsi, pemahaman, langkah dan kejelasan tentang mekanisme pelaksanaan padat karya sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian dan evaluasi agar tujuan dan sasaran kegiatan padat karya dapat tercapai.



1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

1.6.B. TUJUAN



1. Menciptakan kesempatan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai.



2. Memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat Desa.



3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat Desa.



4. Meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.



5. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.



6. Membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di Desa.



1.7. SASARAN



- 1 Penganggur:**
Penduduk, baik laki-laki dan perempuan namun bukan anak-anak, yang tidak mempunyai pekerjaan, yang diputus hubungan kerja, dan yang sedang mencari pekerjaan.
- 2 Setengah Penganggur:**
 - Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (<35 jam seminggu).
 - Petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.
- 3 Penduduk miskin:**
Memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.
- 4 Stunting:**
Penduduk yang memiliki balita bermasalah gizi.



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



BAB 2

ARAHAN PELAKSANAAN





2.1. PRINSIP PADAT KARYA TUNAI DI DESA TAHUN 2018

INKLUSIF

Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan

PARTISIPATIF

Dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah desa.

TRANSPARAN & AKUNTABEL

Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

EFEKTIF

Kegiatan yang prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan

SWADAYA & SWAKELOLA

Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa

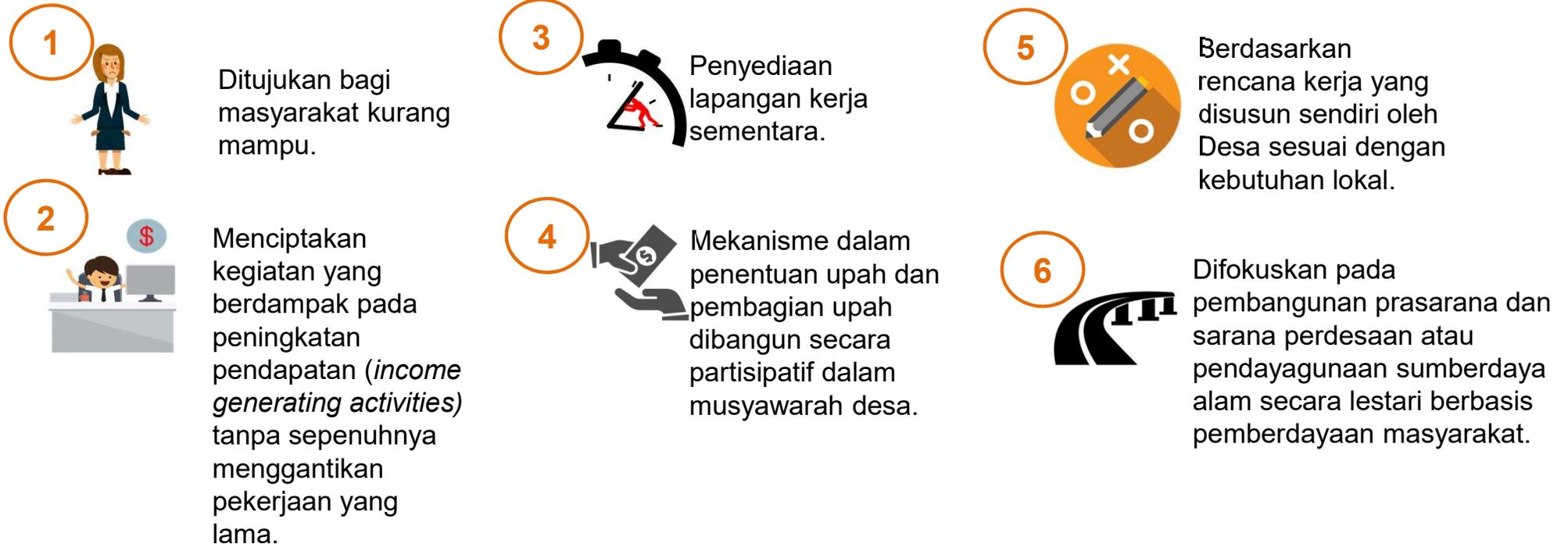
UPAH KERJA

Penentuan upah berdasarkan hasil Musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Kepala Daerah



2.2. MODEL PADAT KARYA TUNAI (CASH FOR WORK) UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KERANGKA PIKIR MODEL CASH FOR WORK:





2.3. MANFAAT



1

Menciptakan kesempatan kerja untuk penganggur, setengah penganggur, penduduk miskin, dan penduduk dengan masalah *stunting* di Desa.

2

Meningkatkan produksi dan produktivitas, upah/pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.



2.4. JENIS KEGIATAN

1

Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan Desa, antara lain: perbaikan alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala Desa, tambatan perahu.



4

Pemberdayaan Masyarakat, antara lain:

- Pengelolaan sampah;
- Pengelolaan limbah;
- Pengelolaan lingkungan pemukiman;
- Pengembangan energi terbarukan;
- Penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).



2



Pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain Pertanian; perhutanan; perkebunan; peternakan; dan perikanan.

5



Kegiatan lainnya

Kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.

3

Kegiatan produktif lainnya, antara lain:

- Pembangunan dan pengembangan desa wisata;
- Ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan;
- Pengelolaan hasil produksi pertanian;
- Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil.





2.5. SIFAT KEGIATAN

1

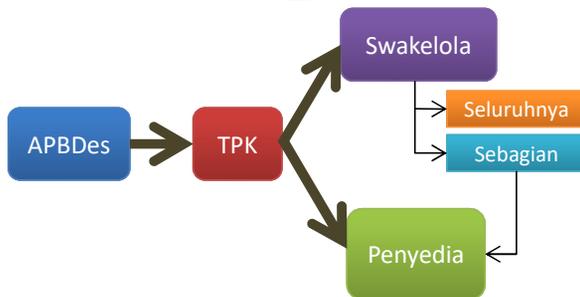
Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa bersifat swakelola dengan tetap dimungkinkan adanya pengadaan barang/jasa sebagian oleh penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan material/bahan baku yang berasal dari Desa setempat, sehingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi warga Desa yang terlibat di kegiatan Padat Karya Tunai.

3

Upah kerja diberikan secara langsung kepada warga Desa yang terlibat kegiatan Padat Karya Tunai. Upah kerja dimaksud diberikan secara harian, namun apabila tidak memungkinkan diberikan secara mingguan.





2.6. KRITERIA KEGIATAN

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok, dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok.



Pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat Desa yang memiliki dan tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat Desa untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas.



Kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan dan teknologi tepat guna.





2.7. LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DESA

- Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan di seluruh desa di Indonesia.
- Sebagian besar Desa di Indonesia memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar.
- Pembangunan Desa akan lebih efektif dengan menggunakan semangat dari, oleh, dan untuk masyarakat desa dengan kegotong royongan serta kearifan lokal.
- Penggunaan bahan baku dan tenaga kerja setempat menjadi salah satu kunci suksesnya pembangunan desa dengan padat karya.



2.8. LOKASI PRIORITAS PENANGANAN STUNTING

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

Prioritas kegiatan dilaksanakan di 1000 desa dalam 100 kabupaten dengan kriteria:

- **Jumlah Balita Stunting:** jumlah balita pendek dan sangat pendek. Data tersebut bersumber dari Riskesdas 2013 (Kemenkes).
- **Prevalensi Stunting:** Persentase jumlah balita pendek dan sangat pendek. Data tersebut bersumber dari Riskesdas 2013 (Kemenkes).
- **Tingkat Kemiskinan:** merupakan persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota. Susenas 2013(BPS).



Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut dihasilkan urutan Kabupaten prioritas penanganan stunting. Kabupaten prioritas tersebut ditetapkan sejumlah 100 Kabupaten dan memiliki rata-rata jumlah penduduk *Stunting*, Prevalensi *Stunting* dan tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-ratanasional.



2.9. 100 KABUPATEN/KOTA SASARAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA (PRIORITAS PENANGANAN STUNTING)





ANGGARAN UNTUK Mendukung KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA





3.1. ANGGARAN UNTUK Mendukung KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DESA

A DANA DESA

- Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola, sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa dan memungkinkan untuk tidak dikontrakkan kepada pihak ketiga/kontraktor.
- Pelaksanaan kegiatan Padat karya Tunai di Desa yang menggunakan Dana Desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota Tentang Harga Satuan Biaya setempat.

B ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sumber Dana yang berasal dari Kementerian/lembaga yang dapat digunakan untuk kegiatan padat karya tunai di desa tahun 2018 dapat berbentuk:

- Bantuan Pemerintah (Swakelola oleh K/L (DIPA Pusat))
- Tugas Pembantuan (TP) dan
- Bantuan Sosial.

Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa yang menggunakan sumber dana dari Kementerian/ Lembaga dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

- Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten/Kota kepada Desa untuk membiayai kegiatan padat karya tunai;
- Pembiayaan program/kegiatan yang diswakelola oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan padat karya tunai.

Pelaksanaan program/kegiatan padat karya tunai di Desa yang dibiayai dengan APBD provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota dikelola sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



3.1.A. ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA



Pemenuhan **30%** HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa.



Bagi desa yang telah menetapkan APBDesa sebelum terbitnya SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Desa merevisi APBDesa untuk menyesuaikan pemenuhan HOK minimal sebesar 30 %.
- Jika tidak mencapai 30% HOK, maka Desa melakukan penyesuaian perhitungan RAB dan desain teknis kegiatan.



Bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa sampai dengan diterbitkannya SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku agar menyusun RAB dan Desain Teknis kegiatan pembangunan untuk memenuhi minimal 30% untuk membayar upah atau yang disebut HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa.



3.1.B. PENYELARASAN WAKTU DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI YANG BERASAL DARI DANA DESA

	Jan	Feb	Mar	April- Juni	Juli	Agt-Nov	Des	Jan-Maret 2019	
PUSAT	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan Pedoman Umum Menyiapkan Pedoman Teknis Sosialisasi Pedoman dan Kegiatan ke K/L dan Daerah Penyaluran Dana Desa tahap I (20%) dari RKUN ke RKUD 		Penyaluran Dana Desa tahap II (40%) dari RKUN ke RKUD.		Penyaluran Dana Desa tahap III (40%) dari RKUN ke RKUD.				
PROVINSI	Sosialisasi pelaksanaan Padat Karya ke Kabupaten/Kota								
KABUPATEN	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Padat Karya ke Desa Penyaluran Dana Desa tahap I (20%), 7 hari kerja dari RKUD ke RKD. 		Penyaluran Dana Desa tahap II (40%), 7 hari kerja dari RKUD ke RKD.		Penyaluran Dana Desa tahap III (40%), 7 hari kerja dari RKUD ke RKD				
DESA	Pelaksanaan Padat Karya				<ul style="list-style-type: none"> Laporan realisasi APBDes ke Kabupaten/Kota semester I Pelaksanaan padat karya 	Pelaksanaan Padat Karya		<ul style="list-style-type: none"> Laporan realisasi APBDes ke Kabupaten/Kota semester I Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD dan Bupati/Walikota (melalui Camat) 	



3.1.C. TAHAPAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI DANA DESA

1

Penyusunan RAPBDesa berdasarkan RKP Desa.

2

Review RAPBDesa oleh Kabupaten/Kota maupun Desa.

3

Persiapan Pelaksanaan
Pembentukan TPK, penyusunan rencana kerja, pendataan tenaga kerja dan identifikasi sumber daya lokal yang akan diambil secara padat karya, pengadaan barang dan jasa.

4

Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal sesuai tujuan padat karya tunai dan pelaksanaan HOK, pembayaran upah).

5

Pelaporan (data tentang HOK, jumlah tenaga kerja yang terlibat, anggaran yang diserap untuk upah).

6

Pembinaan dan Pengawasan oleh Kabupaten/Kota dan Camat.



Menganggarkan kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya (skema *cash for work*) yang diwajibkan untuk didanai dengan Dana Desa dalam APBDes.

Keterangan: Pengaturan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: PMK50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa juncto Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Permendesa PDPTT No.19/2017 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa, Permendagri No.113/2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.



3.2. PADAT KARYA MELALUI PROGRAM KEMENTERIAN/LEMBAGA



- Kementerian/Lembaga melaksanakan kegiatan padat karya tunai di desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70/2012 junctis Peraturan Presiden 172/2014 junctis Peraturan Presiden 4/2015.
- Lokasi di seluruh Desa dengan penekanan prioritas penanganan *stunting* yaitu di 1.000 desa pada 100 Kabupaten.

KEMENTERIAN PELAKSANA UTAMA



KEMENTERIAN DESA PDTT



KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN PUPR



KEMENTERIAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA YANG MEMILIKI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA



3.2.A ARAHAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA



Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan wajib melaksanakan padat karya tunai di Desa.



Kementerian/Lembaga lainnya dapat melaksanakan padat karya tunai di Desa.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari anggaran Kementerian/Lembaga mengacu pada pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 junctis Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden 4 Tahun 2015.

Dalam hal dimungkinkan untuk melakukan swakelola Tipe III atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola agar Kementerian/Lembaga melakukan revisi pengadaan barang/jasa.

Bagi K/L yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan swakelola tipe III sesuai peraturan perundang-undangan maka wajib melibatkan kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin, pencari nafkah utama keluarga, laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak, tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan atau diputus hubungan kerja, serta petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa tanam/panen.

Kementerian/Lembaga perlu melakukan revisi DIPA 2018 untuk pelaksanaan padat karya tunai di 1000 Desa di 100 Kab/Kota (lokasi prioritas penanganan stunting).





3.2.B. PENYELARASAN WAKTU PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN K/L TAHUN 2018

	Jan	Feb - Des	Januari 2019
PUSAT (K/L)	<ul style="list-style-type: none">Menyiapkan Pedoman UmumMenyiapkan Pedoman Teknis	Pelaksanaan Padat Karya	Evaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa
DAERAH (PROVINSI & KABUPATEN)	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan: <ul style="list-style-type: none">Sosialisasi Pedoman dan Kegiatan ke K/L dan DaerahPendataan tenaga kerja	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan: <ul style="list-style-type: none">Fasilitasi K/L untuk melaksanakan Padat Karya	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan: Fasilitasi K/L dalam mengevaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa
DESA	<ul style="list-style-type: none">Persiapan dan SosialisasiPendataan tenaga kerjaPembentukan panitia dan kelompok masyarakat pelaksana.	<ul style="list-style-type: none">Pelaksanaan (pelibatan tenaga kerja lokal dari Desa) dan pemantauan.Desember dilakukan evaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa	



3.2.C. TAHAPAN TEKNIS PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (SWAKELOLA TIPE III ATAU KELOMPOK MASYARAKAT PELAKSANA SWAKELOLA)

PERENCANAAN

Penyampaian informasi kegiatan, lokasi dan anggaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

PERSIAPAN PELAKSANAAN

1. Sosialisasi kegiatan padat karya tunai di desa dan petunjuk teknis operasional kegiatan tersebut kepada kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.
2. Sosialisasi Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan berupa pekerjaan konstruksi sederhana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dan berbagai pihak terkait di daerah dan desa, termasuk TPK dan Tim Swakelola.
3. Pendataan tenaga kerja lokal dan identifikasi sumber daya lokal (bahan material, peralatan, teknologi) sesuai dengan Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan. K/L melakukan pendaftaran seluruh pekerja pada jaminan kesehatan untuk melindungi dari kecelakaan kerja.
4. Melakukan penyesuaian kembali antara Desain Teknis dan Rencana Kerja Teknis Kegiatan dengan kebutuhan lapangan.
5. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres No.54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Perpres No.70/2012 junctis Perpres No.172/2014 junctis Perpres No. 4/2015.

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pengawas, pengelola dan/atau pelaksana teknis untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan mengoptimalkan peran TPK & Tim Swakelola.
2. Memberikan pembinaan teknis pada Pemerintah desa dan pendampingan teknis pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang bekerja sebagai pengawas, pengelola maupun pekerja teknis.
3. Mendorong pelibatan tenaga kerja lokal pada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola sesuai dengan tujuan padat karya tunai di desa.
4. Melakukan serah terima hasil pekerjaan dari K/L penanggungjawab ke Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat sesuai ketentuan perundangan.

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

1. K/L Penanggungjawab anggaran melakukan pemantauan berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan dan kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.
2. K/L Penanggungjawab anggaran melibatkan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, aparat kecamatan dan pemerintah desa dalam seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi.
3. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala (bulanan atau triwulanan) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada K/L penanggungjawab anggaran dan Pemerintah Desa disertai bukti pelaksanaan kegiatan yang disahkan pemerintah desa seperti data rinci tenaga kerja serta NIK kependudukan, daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, dan lainnya. Termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan di desa.
4. Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan bersama-sama dengan TPK dan Tim Swakelola.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa oleh Bupati/Walikota dapat didelegasikan kepada Camat.
2. OPD atau Dinas Kabupaten/Kota terkait turut serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa.



3.2.D. INVENTARISASI KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK PADAT KARYA TUNAI DI DESA

No	Kementerian	Jenis Kegiatan Tahun 2018	Kapasitas Program/Kegiatan pada tahun 2018	Kesesuaian Lokasi Kegiatan dengan Lokasi Padat Karya dan Stunting
1.	Kementerian Desa PDTT	Pembangunan Embung Desa, Sarana Olah Raga Desa, Sarana dan Prasarana Dasar Desa	330 Kabupaten	100 Kabupaten
2.	Kementerian Kesehatan	Pemberian Makanan Tambahan	100 Kabupaten	100 Kabupaten
3.	Kementerian PUPERA	PAMSIMAS, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Pemeliharaan Rutin dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	100 Kabupaten	100 Kabupaten
4.	Kementerian Pertanian	Sarana prasarana pertanian berbasis komoditas	220 Kabupaten	100 Kabupaten
5.	Kementerian Kelautan & Perikanan	Minapadi, kampung nelayan, Pugar, Bioflok	n/a	20 Kabupaten
6.	Kementerian Perhubungan	Jaringan kereta api, pembangunan drainase di bandara dan pelabuhan	n/a	35 Kabupaten
7.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perbatasan	12 Kabupaten	5 Kabupaten

Keterangan: Masih dimungkinkan untuk Kementerian/Lembaga lainnya untuk melaksanakan padat karya tunai di Desa.

n/a = data belum tersedia.



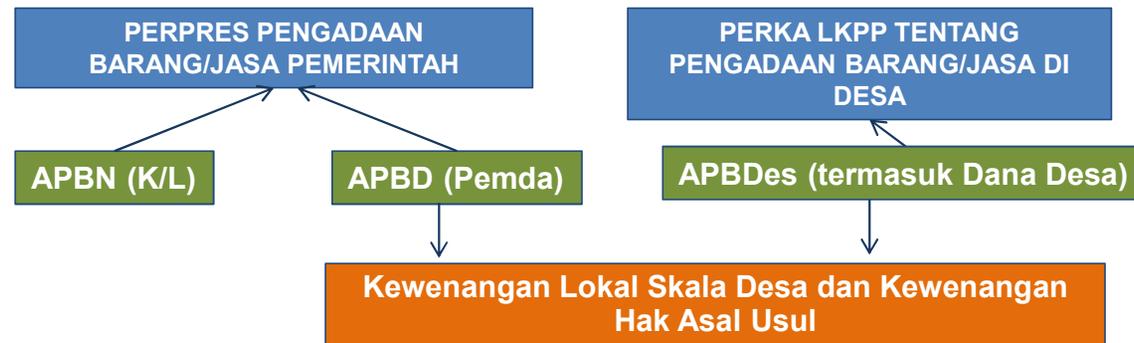
3.3. PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA YANG BERSUMBER DARI APBD



DASAR HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

- 1 **Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010** tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 junctis Peraturan Presiden 172 Tahun 2014 junctis Peraturan Presiden 4 Tahun 2015
- 2 **Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013** tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa juncto Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- 3 **Surat Keputusan Bersama 4 Menteri** Tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

ACUAN MEKANISME BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PADAT KARYA TUNAI



*catatan: Tahun 2018 merupakan masa transisi dalam pelaksanaan program/kegiatan K/L ke Desa terkait padat karya tunai. Adapun pedoman teknis pelaksanaan padat karya tunai di desa yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota akan diatur oleh Gubernur atau Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



BAB 4 PENGORGANISASIAN





4.1. PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN PENGORGANISASIAN



KEBIJAKAN

DESAIN KEGIATAN

IMPLEMENTASI

Pemerintah Pusat

- pelaksanaan, pemantauan pengendalian dan evaluasi program padat karya tunai di Desa secara komprehensif agar sesuai arahan Presiden dan target nasional RPJMN 2015-2019.
- Penerbitan regulasi tentang mekanisme revisi APBDes

memberikan arahan teknis pelaksanaan padat karya agar optimal sesuai dengan urusan yang ditanganinya.

- Melaksanakan dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan padat karya tunai di desa sesuai urusan yang ditanganinya.
- Penyediaan dukungan pendanaan
- Membentuk Sekretariat Bersama antar K/L

Pemerintah Provinsi

Bertanggungjawab terhadap koordinasi pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Padat Karya Tunai di Desa.

- Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi sesuai dengan karakteristik daerah.
- Optimalisasi peran dan fungsi TKPKD sebagai tim koordinasi perencanaan dan pengendalian padat karya di desa

Pemerintah Kabupaten/Kota

- Menyusun peraturan kepala daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- Penerbitan peraturan kepala daerah tentang mekanisme perubahan APBDes.

- Melakukan pembinaan pelaksanaan padat karya tunai kepada Desa
- Optimalisasi peran dan fungsi TKPKD sebagai tim koordinasi perencanaan dan pengendalian padat karya di desa
- Membentuk Sekretariat Bersama antar OPD

Pemerintah Desa

- Menyelenggarakan Musyawarah Desa
- Penetapan RKPDes dan APBDes.
- Bersama BPD untuk menyusun rencana kerja kegiatan, besaran upah dan pemenuhan tenaga kerja dan bahan material lokal.

- Merancang kegiatan padat karya tunai di desa sesuai dengan kewenangan lokal desa dan hak asal-usul.
- Membentuk tim pengelola kegiatan

- Melaksanakan kegiatan padat karya tunai
- Penggunaan tenaga kerja dan material secara lokal.
- Melakukan pemantauan evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan secara berkala.



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

4.2. PEMBAGIAN PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan
Republik Indonesia



Sekretariat Kabinet
Republik Indonesia



KEMENDESA



Kemenko Bidang PMK

- Koordinasi Persiapan dan Pelaksanaan Antar K/L.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.

Sekretariat Kabinet

- Penyiapan dan penyampaian analisis atas persiapan dan pelaksanaan padat karya tunai kepada Presiden.
- Koordinasi dengan K/L terkait.

Kementerian Desa PDTT:

- Menetapkan Juknis penggunaan Dana Desa.
- Koordinasi Penguatan dan Peran Pendamping Desa.
- Monitoring dan Evaluasi Dana Desa untuk Program Padat Karya Tunai di Desa.
- Bimbingan teknis pelaksanaan padat karya tunai di Desa kepada para pendamping dan pengelola di Desa.

Kementerian Keuangan:

- Penyusunan Kebijakan Percepatan Penyaluran Dana Desa.
- Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- Sinergi Pendanaan dan Evaluasi Efektivitas PKH, Rastra dan Dana Desa
- Penyederhanaan Pelaporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa
- Monitoring dan Evaluasi Padat Karya Tunai yang bersumber dari Dana Desa



BPKP:

- BPKP bersama APIP melakukan pengawasan atas pelaksanaan program padat karya yang dilaksanakan oleh K/L/Pemda.
- Pendampingan dan bimbingan teknis dalam pelaporan keuangan APBDesa termasuk Dana Desa.
- Pengawasan Tata Kelola Keuangan Desa.



Kemendagri:

- Supervisi kepada Daerah.
- Penguatan peran Kecamatan
- Supervisi Perencanaan dan Penyusunan APBDesa.
- Penyederhanaan Pelaporan Pertanggungjawaban.
- Peningkatan kapasitas SDM pemerintah Des dan BPD.
- Fasilitasi dan/atau Bimbingan teknis pelaksanaan padat karya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Desa.



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LKPP:

- Pembinaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Kementerian Sosial:

- Sinergi kegiatan padat karya tunai di Desa di intansinya.



Kementerian PPN/
Bappenas

BAPPENAS:

- Penetapan Lokus Desa bersama TNP2K dan Kemenko Bidang PMK.
- Penyiapan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa 2018 yang dilakukan oleh Pemda dan K/L.
- Koordinasi dengan LKPP, dan K/L lainnya terkait pengadaan barang/jasa.



KEMNAKER

Kemenaker:

- Menetapkan penggunaan Dana Kemenaker untuk Desa.
- Penyusunan Juknis Padat Karya Tunai di Desa.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.



KEMENTERIAN
PSU/PS



Kementan, KemePUPERA, Kemenhub dll:

- Menyusun Juknis dan Menu Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa sesuai tugas fungsi.
- Pengelolaan Kegiatan Padat Karya Tunai di Sasaran Desa Prioritas pada 100 Kabupaten/Kota

Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota)

- Koordinasi dan Supervisi.
- Pembinaan dan pengawasan.
- Sosialisasi kepada Desa
- Peningkatan kapasitas dan Pendampingan.



Catatan: Kemenko Bidang PMK, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri bersama-sama melakukan sosialisasi SKB 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU Desa.



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



BAB 5 PENUTUP





5.1. PENUTUP



Program Pembangunan Desa Padat Karya Tunai harus dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh agar dapat memberikan kesempatan kerja dan tambahan upah/pendapatan kepada masyarakat miskin desa.



Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat; mengurangi angka gizi buruk; mengurangi kemiskinan; menggerakkan ekonomi desa; serta mengembangkan kawasan perdesaan.



Keberhasilan Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa sangat bergantung pada dukungan, kerjasama dan kemitraan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; serta pelaksanaan teknis oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.



Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa perlu mempertahankan gotong royong dan partisipasi dari masyarakat Desa sehingga pembangunan yang dihasilkan dapat terpelihara dengan baik oleh Desa dan berkelanjutan.



Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan



LAMPIRAN





TENAGA PENDAMPING YANG DAPAT MEMBANTU PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA



Dalam pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa, para pendamping di desa memiliki tugas untuk :

- Memfasilitasi perencanaan kegiatan padat karya tunai di desa melalui musyawarah desa yang partisipatif dan melibatkan semua stakeholder;
- Melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di desa untuk memastikan kegiatan padat karya sesuai dengan pedoman yang ada; dan
- Berkoordinasi dan bersinergi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan.

KEMENAKERTRANS

900 orang

Pendamping Kegiatan Tenaga Kerja Mandiri

KEMENPORA 41.926

orang
Pendamping Anti Narkoba, Pendamping
Pemberdayaan Pemuda di Desa, Pendamping Pemuda
Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan

KEMENTAN 62.833

orang
Tenaga Fungsional PNS, Tenaga Harian Lepas,
Penyuluh Swadaya

KEMEN KUKM 20.773

orang
Penyuluh Koperasi Lapangan, Pendamping bagi
KSP/USP Koperasi, Pendampingan Pembiayaan Syariah,
Pendampingan Hak Atas tanah, Pendampingan KUR,
Pendamping PLUT, Pendamping IUMK, Pendamping
dampak Globalisasi, Pendamping Pasca Diklat, Satgas
Pengawas Koperasi/Satgas Pengawas KSP

KLHK 300

orang
Pendamping Hutan Lindung,
Pendamping KPH

KKP 5783

orang
Penyuluh Kelautan dan Perikanan

KEMENDESA 40.142

orang
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Tenaga Ahli
infrastruktur Desa, Tenaga Ahli Infrastruktur Desa, Tenaga Ahli
Pembangunan Partisipatif, Tenaga Ahli Pengembangan
Ekonomi Desa, Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat
Guna, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial, Pendamping Desa
Pemberdayaan, Pendamping Desa Teknik Infrastruktur,
Pendamping Lokal Desa

KEMENSOS 48.471

orang
Rehabilitasi Sosial Anak, Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia,
Rehabilitasi Sosial Korban Napza, Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas, Penanggulangan Bencana Alam, Sosial
Kemasyarakatan, KUBE

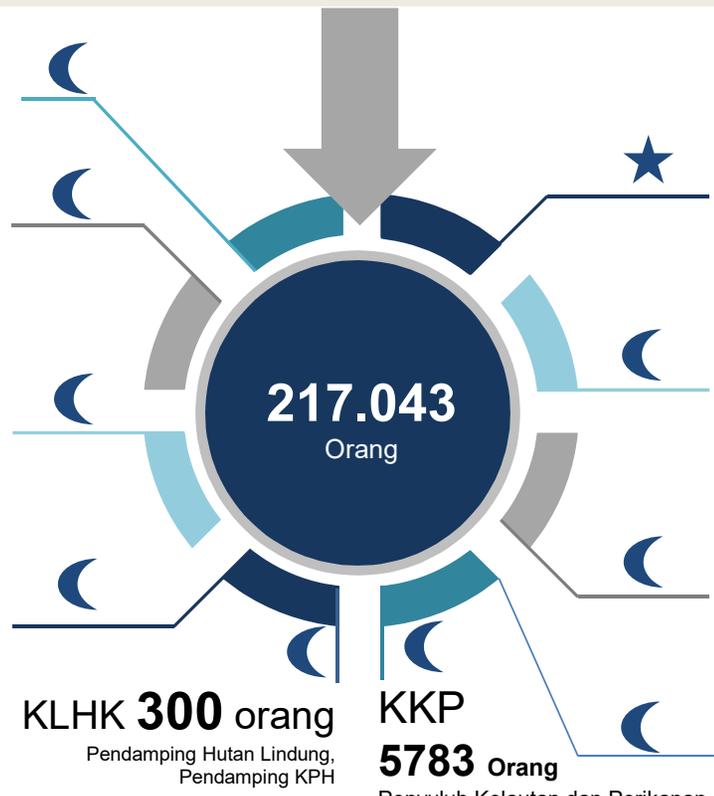
KEMENDAGRI 6.541

orang
Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Dibiayai Dana Desa

★ *Pendamping Profesional*
☾ *Pendamping Teknis*





DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
Aceh	Aceh Tengah	Celala	Melala	Banten	Pandeglang	Banjar	Kadumaneuh					
			Uning Berawang Ramung				Cipeucang	Kadugadung				
		Ketol	Pantan Reduk					Kaduhejo	Koncang			
			Simpang Juli						Koroncong	Bayumundu		
		Kute Panang	Pantan Jerik					Koroncong	Pakuluran			
			Linge						Linge	Pasirkarag		
							Owaq				Tegalongok	
							Pegasing				Pegasing	Saketi
							Rusip Antara				Sindangresmi	Pasirdurung
							Aceh				Pidie	Kembang Tanjong
		Mutiara Timur	Balee Ujong Rimba				Luas	Tuguk				
			Campli Usi				Lungkang Kule	Datar Lebar li				
							Mesjid Usi				Nasal	Air Batang
							Simpang Tiga				Nien	Tanjung Betuah
							Teungoh Mangki				Padang Guci Hilir	Talang Jawi li
							Tangse				Ulee Gunong	Semidang Gumay
							Tiro/Truseb				Tanjung Kemuning	Padang Tinggi
							Panton Beunot				Pantun Beunot	Tetap
							Peunadok					Cucupan
							Bali				Gianyar	Gianyar
			Siangan				Nanggulan	Donomulyo				
			Payangan				Beresela	Pengasih	Karangsari			
			Tampaksiring					Sendangsari				
							Sanding	Samigaluh	Gerbosari			
			Tegallalang					Kebon Harjo				
							Kedisan		Ngargosari			
			Pupuan					Pagerharjo				
							Taro		Sidoharjo			
			Ubud					Sidoharjo				
							Lodtunduh		Tuksono			
			Singekerta				Sentolo					



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa		
Gorontalo	Boalemo	Botumoito	Bolihutuo	Jawa Barat	Bandung	Cicalengka	Dampit		
			Hutamonu				Narawita		
			Dulupi				Pangi	Tanjungwangi	
		Paguyaman	Tanah Putih				Cikancung	Mekaraksana	
			Tangga Jaya				Ciparay	Babakan	
			Bongo Tua				Kertasari	Cihawuk	
			Paguyaman Pantai				Bubaa	Pacet	Girimulya
		Tilamuta	Lito				Pameungpeuk	Rancatungku	
			Towayu				Paseh	Karangtunggal	
			Bajo				Pasirjambu	Cibodas	
Gorontalo	Gorontalo <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Bilato	Bumela	Jawa Barat	Bandung Barat	Cihampelas	Cipatik		
		Biluhu	Biluhu Barat				Pataruman		
		Bongomeme	Lobuto				Tanjungwangi		
			Kayumerah				Cikalong Wetan	Ciptagumati	
		Liyodu	Cipeundeuy				Jatimekar		
		Dungaliyo	Ambara				Padalarang	Ciburuy	
		Limboto Barat	Haya-Haya					Cimerang	
			Huidu Utara				Saguling	Jati	
		Pulubala	Bakti					Saguling	
		Tilango	Tabumela				Sindangkerta	Sindangkerta	
Jambi	Kerinci	Air Hangat Barat	Hampanan Pugu	Jawa Barat	Bogor	Caringin	Cimande		
			Koto Tengah					Pasir Buncir	
		Danau Kerinci	Sanggaran Agung					Tangkil	
			Talang Kemulun					Cibungbulang	Cibatok 2
			Tebing Tinggi					Cigudeg	Banyu Resmi
		Keliling Danau	Pulau Tengah					Kelapa Nunggal	Leuwikaret
			Sitinjau Laut				Hiang Sakti		Leuwiliang
		Siulak	Koto Sekilan Ambai					Sukajaya	Sukamulih
			Koto Tengah					Sukamakmur	Pabuaran
		Siulak Mukai	Mukai Tengah					Sukaraja	Sukatani



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN STUNTING



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	
Jawa Barat	Cianjur <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Campaka Mulya	Sukabungah	Jawa Barat	Indramayu	Anjatan	Cilandak	
		Cidaun	Cibuluh			Gantar	Mekarjaya	
		Cikalongkulon	Kamurang			Kandanghaur	Eretan Wetan	
		Leles	Puncakwangi				Ilir	
		Pagelaran	Kertaraharja				Karangmulya	
		Pasirkuda	Pusakajaya				Wirapanjunan	
		Sindangbarang	Kertamukti			Kroya	Jayamulya	
		Sukaresmi	Cikancana			Pasekan	Karanganyar	
			Ciwalen			Tukdana	Karangkerta	
			Rawabelut				Mekarsari	
Jawa Barat	Cirebon	Astanajapura	Astanajapura	Jawa Barat	Karawang	Banyusari	Gembongan	
		Babakan	Bojonggebang				Pamekaran	
			Kudukeras			Batujaya	Baturaden	
			Kudumulya			Cilamaya Wetan	Sukakarta	
			Serang Kulon			Jayakarta	Ciptamarga	
			Gempol			Kutawaluya	Kutagandok	
			Walaha				Mulyajaya	
			Lemahabang			Cipeujeuh Wetan		Sindangkarya
			Mundu			Sinarancang	Tirtajaya	Srikamulyan
			Plered			Sarabau	Tirtamulya	Kamurang
Jawa Barat	Garut	Cibalong	Simpang	Jawa Barat	Kuningan	Ciawigebang	Ciputat	
		Cibatu	Wanakerta				Kadurama	
		Cisewu	Girimukti				Sukaraja	
			Karangsewu				Cidahu	Cikeusik
		Leles	Lembang				Cigandamekar	Bunigeulis
		Leuwigoong	Leuwigoong				Cigugur	Cisantana
		Malangbong	Sukarasa				Ciwaru	Citundun
		Pakenjeng	Jayamekar					Sagaranten
			Pasirlangu				Garawangi	Pakembangan
			Sukaresmi			Padamukti	Nusaherang	Ciasih



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa		
Jawa Barat	Subang	Binong	Kediri	Jawa Barat	Tasikmalaya	Cikatomas	Tanjungbarang		
		Cibogo	Majasari			Jatiwaras	Sukakarta		
		Compreng	Sukadana			Puspahiang	Puspasari		
		Jalancagak	Bunihayu			Salopa	Mandalahayu		
		Legonkulon	Legonkulon				Mulyasari		
			Mayangan				Sukahening	Calingcing	
			Pamanukan			Mulyasari		Kiarajungkung	
			Pusakanagara			Kotasari		Sundakarta	
			Serangpanjang			Cintamekar		Sukaesik	Banjarsari
			Tanjungsiang			Kawungluwuk			Margamulya
Jawa Barat	Sukabumi	Bantargadung	Bantargadung	Jawa Tengah	Banyumas	Baturraden	Pandak		
			Bantargebang			Cilongok	Gununglurah		
			Bojonggaling			Gumelar	Paningkaban		
			Boyongsari			Jatilawang	Gentawangi		
			Limusnunggal				Gunung Wetan		
			Mangunjaya				Karanglewas		
			Cidahu			Cidahu	Kalibagor	Srowot	
						Pondok Kaso Tengah	Patikraja	Karangendep	
			Kebonpedes			Kebonpedes	Pekuncen	Banjaranyar	
			Palabuhanratu			Pasirsuren	Sumbang	Datar	
Jawa Barat	Sumedang	Cisarua	Kebonkalapa	Jawa Tengah	Blora	Cepu	Cabeyan		
		Cisitu	Cimarga				Getas		
		Conggeang	Ungkal				Kapuan		
		Pamulihan	Cijeruk				Sumberpitu		
			Cilembu				Jiken	Bangowan	
			Mekarbakti				Kota Blora	Patalan	
			Rancalong			Sukahayu		Temurejo	
			Situraja			Malaka		Kunduran	Jetak
			Sukasari			Mekarsari			Klokah
			Sumedang Utara			Margamukti		Tunjungan	Adirejo



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
Jawa Tengah	Brebes <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Banjarharjo	Cigadung	Jawa Tengah	Grobogan	Geyer	Geyer
		Bulakamba	Grinting			Juworo	
		Bumiayu	Jatisawit			Karang Anyar	
			Kalilangkap			Ledokdawan	
			Kalinusu			Rambat	
			Pruwatan			Grobogan	Putatsari
		Jatibarang	Janegara			Karangrayung	Termas
		Songgom	Dukuhmaja			Pulokulon	Karangharjo
		Wanasari	Glonggong				Sidorejo
			Wanasari				Toroh
Jawa Tengah	Cilacap	Binangun	Karangangka	Jawa Tengah	Kebumen	Adimulyo	Temanggal
			Sidayu			Ambal	Kaibonpetangkuran
		Kawunganten	Kawunganten Lor				Plempukankembaran
		Kedungreja	Tambakreja			Bonorowo	Patukreja
		Kroya	Bajing Kulon			Buayan	Rangkah
			Karangmangu			Buluspesantren	Indrosari
			Pucung Lor			Karanggayam	Pagebangan
		Sampang	B R A N I			Mirit	Tlogopragoto
			Karangasem			Pejagoan	Kebagoran
			Paketingan			Sempor	Semali
Jawa Tengah	Demak	Bonang	Betahwalang	Jawa Tengah	Klaten	Delanggu	Butuhan
			Kembangan			Jatinom	Tibayan
		Demak	Donorejo			Jogonalan	Granting
		Dempet	Kedungori				Sumyang
		Gajah	Boyolali				Titang
			Gedangalas			Kalikotes	Gemblegan
			Sambiroto			Pedan	Ngaren
		Guntur	Guntur			Polanharjo	Keprabon
		Karangawen	Bumirejo			Prambanan	Randusari
		Wonosalam	Sido Mulyo				Sanggrahan



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	
Jawa Tengah	Pemalang <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Ampelgading	Losari	Jawa Timur	Bangkalan	Kokop	Durjan	
		Bantarbolang	Purana			Kwanyar	Batah Timur	
		Bodeh	Kebandungan				Dlemer	
			Longkeyang				Duwek Buter	
			Parunggalih				Gunung Sereng	
		Comal	Tumbal				Morombuh	
		Moga	Mandiraja				Tebul	
			Wangkelang				Modung	Glisgis
		Pemalang	Tambakrejo					Neroh
		Petarukan	Kalirandu				Tanjungbumi	Bumi Anyar
Jawa Tengah	Purbalingga	Kaligondang	Brecek	Jawa Timur	Bondowoso	Binakal	Baratan	
			Cilapar				Gadingsari	
			Sempor Lor				Sumber Tengah	
		Kemangkon	Plumutan				Grujugan	Tegalmijin
		Kutasari	Candinata				Klabang	Wonokerto
		Mrebet	Kradenan				Maesan	Penanggungan
			Sangkanayu				Prajekan	Bandilan
			Selaganggeng					Walidono
		Padamara	Kalitinggar Kidul				Sumber Wringin	Sumberwringin
		Rembang	Bantarbarang				Tapen	Cindogo
Jawa Tengah	Wonosobo	Kalikajar	Kwadungan	Jawa Timur	Jember	Gumuk Mas	Purwoasri	
			Purwojiwo				Jelbuk	Jelbuk
		Kejajar	Igirmranak				Jenggawah	Cangkring
			Sigedang				Jombang	Ngampelrejo
		Kepil	Ngalian				Kalisat	Gambiran
			Pulosaren					Patempuran
			Tanjunganom				Ledokombo	Slateng
		Kertek	Pagerejo					Sukogidri
		Selomerto	Pakuncen				Panti	Glagahwero
		Wadaslintang	Sumbersari				Tempurejo	Tempurejo



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
Jawa Timur	Lamongan	Babat	Datinawong	Jawa Timur	Pamekasan	Pademawu	Durbuk					
			Glagah				Glagah	Jarin				
			Karangturi					Palengaan	Angsanah			
			Konang						Banyupelle			
			Panggung						Panaan			
		Wonorejo					Potoan Daja					
		Karangbinangun	Palangan					Rek Kerrek				
			Modo			Nguwok		Proppo	Campor			
			Ngimbang			Ganggantingan			Candiburung			
		Jawa Timur	Malang			Ampelgading	Pucuk	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	Pangbatok	
							Mulyoasri				Krejengan	
						Bantur	Wonorejo					Rawan
						Dampit	Baturetno					Seboro
Kasembon	Pait				Paiton	Bhinar						
Pagelaran	Brongkal					Kalikajar Kulon						
Pujon	Pujon Kidul					Kalikajar Wetan						
	Wiyurejo					Petunjungan						
Jawa Timur	Nganjuk	Sumbermanjing	Tambakrejo	Jawa Timur	Sampang	Banyuates	Randutatah					
			Purwosekar						Pakuniran	Sogaan		
		Tajinan	Wonoayu					Tiris	Tegalwatu			
		Wajak	Patranrejo					Jrengik	Trapang			
		Berbek	Sumber Urip					Jrengik	Bancelok			
		Jatikalen	Lumpang Kuwik						Jrengik			
Jawa Timur	Nganjuk	Ngetos	Perning	Jawa Timur	Sampang	Karang Penang	Gunung Kesan					
			Mojoduwur						Ketapang	Karang Anyar		
		Ngronggot	Cengkok					Pangarengan	Pacanggaan			
			Mojokendil					Sampang	Banyumas			
		Pace	Bodor						Gunung Maddah			
		Tanjunganom	Sumberkepuh						Pulau Mandangin			
		Wilangan	Sukoharjo					Torjun	Tana Mera			



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa			
Jawa Timur	Sumenep	Batang Batang	Bilangan	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Amuntai Selatan	Simpang Empat			
			Nyabakan Timur			Babirik	Hambuku Lima			
		Bluto	Tamedung							Sungai Papuyu
			Aengbaja Raja					Banjang	Baruh Tabing	
		Dungkek	Sera Tengah					Danau Panggang	Baru	
			Lapa Daya					Haur Gading	Jingah Bujur	
			Romben Barat					Sungai Pandan	Murung Asam	
			Romben Guna						Padang Bangkal	
			Sapeken			Sapeken				Pondok Babaris
			Saronggi			Kambing Timur				Tambalang
Jawa Timur	Trenggalek	Bendungan	Botoputih	Kalimantan Tengah	Barito Timur	Dusun Tengah	Ampah Dua			
			Dongko			Cakul		Rodok		
		Gandusari	Jajar					Dusun Timur	Mangkarap	
			Karangan			Kayen		Karusen Janang	Putut Tawuluh	
		Pogalan	Kedunglurah					Pematang Karau	Bambulung	
			Suruh			Mlinjon			Bararawa	
			Nglebo						Ketab	
			Ngrandu						Kupang Bersih	
			Puru						Muara Palantau	
			Trenggalek			Dawuhan				Muruduyung
Kalimantan Barat	Ketapang <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Benua Kayong	Sungai Kinjil	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	Babulu	Babulu Laut			
		Delta Pawan	Sukabangun					Gunung Makmur		
		Jelai Hulu	Rangga Intan					Labangka Barat		
		Muara Pawan	Ulak Medang					Sri Raharja		
		Sandai	Alam Pakuan						Sumber Sari	
			Muara Jekak					Sepaku	Binuang	
		Simpang Dua	Mekar Raya						Karang Jinawi	
		Tumbang Titi	Batu Tajam						Sukaraja	
			Mahawa						Tengin Baru	
			Serengkah Kanan					Waru	Api Api	



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
Kalimantan Utara	Malinau	Kayan Hilir	Long Sule	Lampung	Lampung Selatan	Candipuro	Karya Mulya Sari
		Malinau Barat	Sesua			Way Gelam	
		Malinau Kota	Malinau Hilir			Kalianda	Tajimalela
		Malinau Selatan	Bila Bekayuk			Ketapang	Taman Agung
		Malinau Selatan Hulu	Long Lake				Bangun Rejo
			Nahakramo Baru				Kemukus
		Malinau Utara	Lubok Manis			Natar	Pancasila
			Luso			Penengahan	Banjarmasin
			Respen Tubu			Rajabasa	Batu Balak
			Sungai Boh			Long Lebusan	Way Sulan
Kep. Bangka Belitung	Bangka Barat	Jebus	Rukam	Lampung	Lampung Tengah <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Anak Ratu Aji	Bandar Putih Tua
			Tumbak Petar				Gedung Ratu
		Kelapa	Tugang			Bandar Mataram	Mataram Udik
			Tuik			Bandar Surabaya	Cabang
		Simpang Teritip	Air Nyatoh			Bumi Ratu Nuban	Tulung Kakan
			Berang			Gunung Sugih	Buyut Udik
			Ibul			Pubian	Riau Periang
			Pangek				Tanjung Rejo
			Peradong			Seputih Surabaya	Mataram Ilir
			Simpang Tiga			Terusan Nunyai	Gunung Batin Udik
Kepulauan Riau	Natuna	Bunguran Barat	Batubi Jaya	Lampung	Lampung Timur	Marga Sekampung	Gunung Raya
			Gunung Putri			Margatiga	Negeri Jemanten
			Mekar Jaya				Negeri Tua
			Pian Tengah			Sukadana	Bumi Nabung Udik
			Selaut				Negara Nabung
		Bunguran Timur	Batu Gajah				Sukadana Timur
			Sungai Ulu				Surabaya Udik
		Bunguran Utara	Kelarik Utara			Waway Karya	Ngesti Karya
		Pulau Tiga	Serantas				Tanjung Wangi
			Setumuk				Tri Tunggal



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa		
Maluku	Maluku Tengah <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Banda	Pulau Hatta	Nusa Tenggara Barat	Dompu	Dompu	Dorebara		
			Waer					Katua	
		Saparua	Haria					Oo	
		Seram Utara	Roho				Hu'U	Cempi Jaya	
		Seram Utara Timur Kobi	Maneo Rendah					Persiapan Jala	
		Seram Utara Timur Seti	Seti				Pajo	Ranggo	
			Tihuana				Pekat	Sorinomo	
		Tehoru	Mosso					Upt Nangakara	
			Piliana				Woja	Bakajaya	
			Teon Nila Serua			Trana			Mumbu
Maluku	Seram Bagian Barat	Huamual	Iha	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	Gerung	Mesangkok		
			Luhu				Gunung Sari	Mambalan	
		Huamual Belakang	Buano Utara					Penimbung	
			Tahalupu				Kuripan	Jagaraga	
			Waesala					Kuripan	
		Seram Barat	Negeri Kawa				Lembar	Lembar	
		Taniwel	Mornaten				Lingsar	Batu Mekar	
			Uweth					Langko	
			Wakolo					Sekotong	Buwun Mas
			Taniwel Timur			Lumahlatal			Gili Gede Indah
Maluku Utara	Halmahera Selatan	Bacan Barat Utara	Gilalang	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Batukliang	Mantang		
		Batang Lomang	Kampung Baru				Batukliang Utara	Teratak	
		Gane Barat Selatan	Yamly				Praya Barat	Banyu Urip	
		Gane Timur Selatan	Sawat					Mekar Sari	
		Kayoa Selatan	Pasir Putih					Selong Belanak	
		Kepulauan Jorong	Kukupang				Praya Tengah	Dakung	
			Kurunga				Praya Timur	Marong	
		Mandioli Selatan	Jiko					Sukaraja	
			Lele				Pujut	Mertak	
		Mandioli Utara	Akedabo					Sukadana	



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	Aikmel	Kembang Kerang Daya	Nusa Tenggara Timur	Manggarai Timur	Elar	Haju Ngendong					
			Lenek Duren			Elar Selatan	Nanga Pu'Un					
			Lenek Kali Bambang			Kota Komba	Lembur					
		Jerowaru	Batu Nampar Selatan			Lamba Leda	Compang Deru					
			Batunampar				Golo Mangung					
			Pandan Wangi				Satar Padut					
			Sambelia			Belanting	Poco Ranaka	Pocong				
		Suralaga	Dadap				Rana Mese	Rondo Woing				
			Bagikpayung Timur					Satar Lenda				
			Bintang Rinjani					Torok Golo				
			Nusa Tenggara Barat			Lombok Utara	Bayan	Karang Bajo	Nusa Tenggara Timur	Ngada	Bajawa	Ubedolumolo
								Mumbul Sari			Golewa Selatan	Kezewea
		Sukadana						Inerie			Warupele I	
Gangga	Rempek	Riung		Rawangkalo								
	Kayangan	Dangiang		Riung Barat	Lanamai I							
Kayangan					Wolomeze							
Sesait				Wolomeze	Denatana							
Pemenang	Pemenang Timur				Mainai							
Tanjung	Jenggala				Nginamanu Selatan							
	Sigar Penjalin				Turaloa							
Nusa Tenggara Barat	Sumbawa	Batulanteh		Bao Desa	Nusa Tenggara Timur		Manggarai	Cibal			Bea Mese	
				Kelungkung							Golo Ncuang	
		Empang		Ongko								Kentol
		Lopok	Berora			Cibal Barat		Lenda				
		Moyohulu	Berang Rea			Reok		Robek				
			Maman					Watu Baur				
			Sempe			Reok Barat		Lemarang				
		Orong Telu	Mungkin					Nggalak				
			Rhee	Luk				Satar Mese Barat	Ling			
		Utan	Stowe Brang					Renda				



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*



Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Landu Leko	Bolatena	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Kodi	Ate Dalo	
			Pukuafu				Kawango Hari	
		Lobalain	Holoama			Kodi Balaghar	Karang Indah	
			Kolobolon				Kodi Utara	Bila Cenge
		Ndao Nuse	Mbiu Lombo				Kadu Eta	
			Pantai Baru				Keoen	Kendu Wela
		Rote Barat Daya	Oeledo				Kori	
			Lalukoen				Waitaru	
			Oebatu				Wewewa Selatan	
			Oelasin				Wewewa Tengah	Weri Lolo
Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sabu Liae	Dainao	Nusa Tenggara Timur	Sumba Tengah	Katikutana	Kabela Wuntu	
			Eikare				Katikutana Selatan	Konda Maloba
			Mehona				Mamboro	Tana Modu
			Raerobo				Umbu Ratu Nggay	Watu Asa
		Sabu Tengah	Waduwala					Bolubokat Barat
			Bebae					Lenang Selatan
			Jiwuwu					Tana Mbanas Barat
			Loboaju					Umbu Ratu Nggay Barat
			Matei					Holur Kambata
			Keduru					Umbu Kawolu
Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Kota Waikabubak	Modu Waimaringu	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Katala Hamu Lingu	Kombapari	
			Tebara				Lai Lara	
		Laboya Barat	Patiala Dete				Mandahu	
			Lamboya				Watu Karere	Matawai Amahu
		Tana Righu	Lingu Lango				Prai Bakul	
			Lolo Wano				Matawai La Pawu	Prai Bokul
		Wanokaka	Tarona				Wanggameti	
			Hupu Mada				Nggaha Oriangu	Makamenggit
			Katiku Loku				Tandula Jangga	
			Pari Rara				Paberiwai	Lai Taku



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa
Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Biboki Anleu	Maukabatan	Papua	Jayawijaya	Napua	Holima
		Biboki Tanpah	Oekopa			Napua	
		Bikomi Selatan	Kiusili			Trikora	Nanggo
			Maurisu Utara				Trikora
		Insana	Fatuana			Walaik	Walaik
			Loeram			Wamena	Honelama
			Nansean			Wesaput	Agamaoa
		Miomaffo Barat	Noeltoko				Mawampi
		Mutis	Tasinifu			Wouma	Ketimavit
		Naibenu	Benus				Wouma
Papua	Dogiyai	Kamu	Ekemanida	Papua	Lanny Jaya <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Gupura	Kimbo
		Kamu Timur	Deiyapa			Kelulome	Ilunggijime
		Mapia	Abaimaida			Melagineri	Ganume
			Abaugi / Obaikagopa			Tiom Olo	Kotorambur
			Bomomani				Kukepake
			Magode			Tiomneri	Arungwi
		Mapia Tengah	Bonakunu				Gubo
			Megaikabo				Kuabaga
			Modio				Milinggame
			Ukudawata / Upibega				Muleme
Papua	Intan Jaya	Hitadipa	Pugisiga	Papua	Nduga	Dal	Dal
			Sanaba				Grinbun
		Sugapa	Bilogai				Gurumbe
			Eknemba / Elenemba				Kaboneri
			Mamba				Silan
			Puyagiya				Silankuru
			Titigi				Iniye
			Yalai				Yal
		Ugimba	Nggamagae				Yimogi
			Ugimba				Yigi
			Sirit				



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa						
Papua	Tolikara	Kanggime	Aulani	Sulawesi Barat	Majene	Banggae	Pamboborang						
			Kagimaluk				Malunda	Bambangan					
			Marlo					Salutahongan					
		Nabunage	Kimilo			Pamboang	Adolang Dua						
			Missa				Banua Adolang						
			Timbindelo				Betteng						
			Kumbur				Bonde Utara						
		Wakuo	Mome				Pesuloang						
			Woniki										
							Pagona			Sendana	Pundau		
Yigonikme	Ulumanda			Kabiraan									
Papua Barat	Sorong Selatan	Konda	Bariat	Sulawesi Barat	Mamuju	Bonehau	Banuada						
			Konda					Hinua					
			Manelek					Mappu					
							Wamargege				Salutiwo		
							Saifi				Komanggaret	Kalukku	K E A N G
							Seremuk				Kamaro	Kalumpang	Sandapang
							Tofot				Tapalang	Kopeang	
		Teminabuan					Magis			Tapalang Barat	Labuang Rano		
							Seribauw					Lebani	
							Waigo					Pangasaan	
Riau	Rokan Hulu <i>(10 kabupaten prioritas)</i>	Bangun Purba	Bangun Purba Barat	Sulawesi Barat	Polewali Mandar	Alu	Kalumammang						
			Kepenuhan				Kepenuhan Hilir	Balanipa	Bala				
			Ulak Patian					Lego					
		Kepenuhan Hulu	Kepayang					Campalagian		Padang Timur			
			Rambah								Menaming	Parappe	
		Rambah Samo	Suka Maju						Luyo	Luyo			
			Marga Mulya									Puccadi	
			Rambah Samo									Mapilli	Kurma
							Teluk Aur				Landi Kanusuang		
							Tambusai				Tambusai Timur		Sattoko



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
Sulawesi Selatan	Enrekang	Baraka	Parinding	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	Bolang Itang Barat	Ollot li					
			Baroko				Baroko	Paku Selatan				
		Bungin	Benteng Alla Utara					Bolang Itang Timur	Biontong			
			Banua						Biontong I			
			Sawito						Bohabak I			
		Maiwa	Lebani						Saleo			
									Limbuang	Saleo I		
							Ongko		Sangkub	Monompia		
							Pariwang			Sangkub li		
		Sulawesi Tengah	Banggai			Masalle	Tongkonan Basse	Sumatera Barat	Pasaman	Bonjol	Sangkub Timur	
							Balantak Utara				Batusimpang	Ganggo Hilia
						Bunta	Balanga					Dua Koto
Dondo Soboli	Cubadak											
Koili	Simpang Tonang											
Luwuk Timur	Boitan					Mapat Tunggul Selatan	Muaro Sei Lolo					
							Indang Sari			Panti		
					Lontos		Rao Utara			Koto Rajo		
					Nuhon					Bolobungkang	Tigo Nagari	Binjai
										Mantan B		Ladang Panjang
Sulawesi Tenggara	Buton	Pagimana	Jaya Bakti	Sumatera Barat	Pasaman Barat	Gunung Tuleh	Malampah					
			Kapontori				Bukit Asri	Rabi Jongor				
		Lasalimu	Todanga					Kinali	Katiagan			
			Talaga Baru						Parik			
		Lasalimu Selatan	Siontapina					Lembah Malintang	Ujuang Gadiang			
			Pasar Wajo						Kabawokole	Ranah Batahan	Batahan	
			Siontapina				Laburunci		Sungai Aur	Sungai Aua		
							Kumbewaha			Sungai Beremas	Aia Bangih	
							Labuandiri		Talamau	Kajai		
Manuru	Sinuruik											
			Sampuabalo			Talu						



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	
Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Lempuing Jaya	Tanjung Sari	Sumatera Utara	Nias Utara	Alasa	Anaoma	
		Pampangan	Menggeris			Bitaya		
		Pedamaran	Suka Damai			Fulolo		
		Tanjung Lubuk	Jambu Ilir			Hilisebua Siwalubanua		
			Sukarami			Ombolata		
			Tanjung Beringin			Ononamolo Tumula		
			Tanjung Merindu			Lahewa Timur	Tetehosisorowi	
			Teluk Gelam			Benawa	Lotu	Lolomboli
						Muara Telang	Namohalu Esiwa	Esiwa
						Sugih Waras		Sisobahili
Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	Gunung Sitoli	Hili Hao	Sumatera Utara	Padang Lawas	Aek Nabara Barumun	Paran Julu	
			Hilimbaruzo			Barumun	Binabo Jae	
			Madolaoli			Barumun Tengah	Janji Matogu Ur	
			Onozitoli Olora				Sisalean	
			Saewe			Huristak	Sigading	
			Gunungsitoli Idanoi			Hilimbowo Idanoi	Lubuk Barumun	H Dolok Latong
						Hiliweto Idanoi	Sosa	Bonan Dolok
						Siwalubanua I		Pasir Julu
						Tuhegeo li	Ulu Barumun	Pasar Ipuh
			Gunungsitoli Utara			Lasara Sowu		Taringgonan
Sumatera Utara	Langkat	Babalan	Securai Selatan	DKI Jakarta	Kepulauan Seribu	Kepulauan Seribu Selatan	Pulau Pari	
			Securai Utara				Pulau Tidung	
		Bohorok	Sematar				Pulau Untung Jawa	
		Brandan Barat	Perlis			Kepulauan Seribu Utara	Pulau Harapan	
		Gebang	Paluh Manis				Pulau Kelapa	
		Padang Tualang	Padang Tualang				Pulau Panggang	
		Pangkalan Susu	Sungai Meran					
		Secanggang	Kebun Kelapa					
			Secanggang					
			Tanjung Pura			Pematang Serai		



DAFTAR DESA LOKASI PELAKSANAAN PADAT KARYA DESA TUNAI 2018 PRIORITAS PENANGANAN *STUNTING*

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa					
Nusa Tenggara Timur	Alor	Alor Barat Daya	Pintu Mas	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Amanuban Tengah	Nakfunu					
			Alor Tengah Utara			Dapitau	Boking	Meusin				
			Lembur Tengah			Manetwati	Fatukopa	Nifulinah				
			Manetwati			Kolbano	Nununamat					
		Alor Timur	Maukuru			Kualin	Nunusunu					
			Tanglapui Timur			Kuan Fatu	Taupi					
			Mataru			Mataru Barat	Mollo Utara	Bijaepunu				
		Pantar Barat	Piring Sina			Santian	Manufui					
		Pantar Barat Laut	Lamma				Naifatu					
		Pantar Timur	Bunga Bali				Tobu	Bestobe				
			Lalafang					Tune				
			Nusa Tenggara Timur			Lembata	Buyasari	Atulaleng	Papua Barat	Tambrau	Bikar	Wertim
								Bareng			Kebar	Akmuri
		Kalikur									Atay	
Kaohua		Inam										
Leuwohung		Kebar Tengah / Anjai										
Roho		Kebar Timur / Jandurau										
Tubung Walang		Nekori										
Ile Ape Timur	Jontona			Senopi	Kebar Barat / Senopi							
	Todanara				Wausin							
Nagawutung	Idalolong			Yembun	Metbesa							
Wulandoni	Wulandoni				Syarwom							